

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid. 2019. *Kejahatan Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Bagir Manan. 2016. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Heru Cahyono. 2013. *Demokrasi, Pemilu, dan Partisipasi Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jazim Hamidi. 2016. *Teori dan Paradigma Hukum*. Malang: Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiardjo. 2020. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satjipto Rahardjo. 2002. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Genta Publishing.
- Sigit Pamungkas. 2018. *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsul Nurdin. 2018. *Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

C. Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah Lainnya

Muhammad Abdullah, 2020. Efektivitas Panwaslih dalam Menangani Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Besar. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.

Rina Yuliani. 2019. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pidie. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh.

Intan Permata Sari, 2020. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang dalam Pilkada di Aceh. Tesis. Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Muhammad Rafi Lubis 2021. "Politik Uang dan Lemahnya Penegakan Hukum Pemilu di Daerah." Jurnal Hukum dan Demokrasi, Vol. 8, No. 2, hlm. 160.

Dwi Wulandari, 2022. "Peran Panwaslih dalam Pengawasan Pemilu di Aceh: Studi Kasus Kabupaten Bireuen." Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UIN Ar-Raniry, Vol. 6, No. 1, hlm. 95.

Syahrul Fitriani, 2020. "Tantangan Penegakan Hukum Politik Uang dalam Pilkada Serentak." Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3, hlm. 473.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2018. Kajian Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK.

Bawaslu RI, 2020. Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2019. Jakarta: Bawaslu RI.

Pusat Kajian Politik UI, 2021. Risiko Politik Uang dalam Pilkada: Kajian atas Regulasi dan Praktek di Lapangan. Jakarta: PKP FISIP UI

D. Interner/Website

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2023. Siaran Pers Terkait Politik Uang di Pilkada. Diakses tanggal 18 Mei 2025 dari <https://www.bawaslu.go.id/berita/politik-uang-pilkada-2024>

Detiknews, 2023. "UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Implikasinya bagi Pengawasan Pilkada." Diakses tanggal 20 Mei 2025 dari <https://news.detik.com/berita/d-6440000/uu-10-2016-implikasi-pengawasan-pilkada>

Tirto.id, 2023. "Kasus Politik Uang di Pilkada dan Penanganan oleh Panwaslih." Diakses tanggal 20 Mei 2025 dari <https://tirto.id/kasus-politik-uang-dan-penanganan-panwaslih-pilkada>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024. Peraturan dan Pedoman Pemilihan Kepala Daerah. Diakses tanggal 16 Mei 2025 dari <https://www.kpu.go.id/pilkada/2024/peraturan>

Kompas.com. 2024. "Panwaslih Bireuen Tindak Tegas Pelanggaran Politik Uang dalam Pilkada." Diakses tanggal 18 Juli 2025 dari <https://regional.kompas.com/read/2024/04/15/panwaslih-bireuen-tindak-tegas-politik-uang>

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bireuen, 2024. Laporan Kegiatan Pengawasan Pilkada 2024. Diakses tanggal 16 Agustus 2025 dari <http://panwaslibireuen.go.id/laporan2024>

Dialeksis.com, "Kelola Rp11 Miliar, Panwaslih Bireuen Hanya Limpahkan Satu Kasus Dugaan Money Politic ke Gakkumdu," *Dialeksis*, 7 Maret 2024. Diakses tanggal 22 Agustus 2025 dari <https://dialeksis.com>